

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja merupakan pemilik faktor produksi yang menawarkan jasa dan mempunyai peran penting dalam keberlangsungan proses produksi. Oleh karena itu, atas pengorbanannya tenaga kerja berhak mendapatkan balas jasa dari perusahaannya yaitu berupa penghasilan dalam bentuk upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk menilai hidup dari tenaga kerja atau buruh. Pentingnya pemberian upah kepada tenaga kerja yang sesuai dengan hasil pekerjaannya serta besarnya kebutuhan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha (Charysa, 2013).

Situasi perburuhan yang sifat dan dinamikanya semakin kompleks, masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan pasar kerja yang dualistik dengan penawaran kerja yang tinggi dan mutu angkatan kerja yang rendah di satu sisi menyebabkan upah menjadi isu yang sentral dalam bidang ketenagakerjaan.

Perbedaan cara pandang mengenai upah antara pengusaha dengan pekerja atau buruh memiliki definisi kepentingan yang berbeda. Bagi pengusaha, penentuan upah berkaitan dengan jumlah keuntungan atau profit yang didapatkan. Semakin tinggi upah yang diberikan kepada

pekerja atau buruh maka keuntungan atau profit perusahaan semakin kecil. Sedangkan bagi pekerja atau buruh, penetapan upah yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak akan mengakibatkan pekerja atau buruh tidak maksimal dalam bekerja (Ketiasih, 2017)

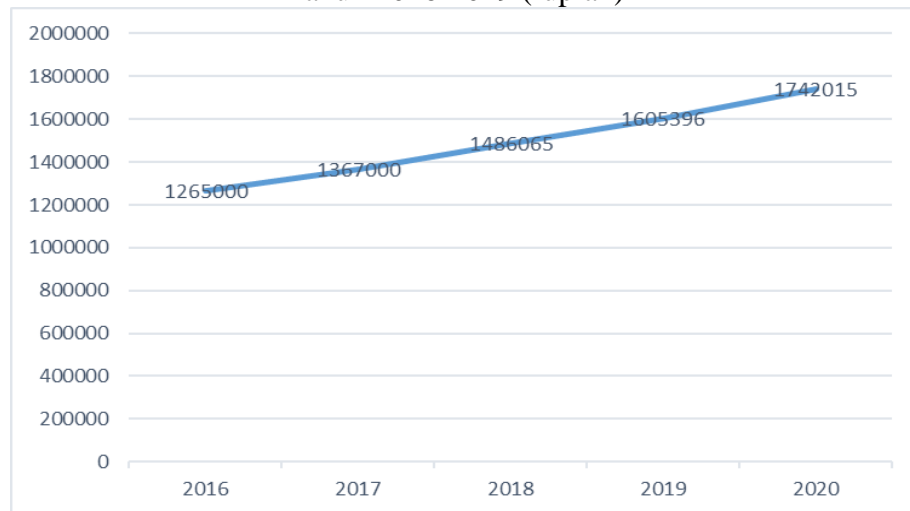
Untuk menghindari kepentingan kedua belah pihak antara pengusaha dan pekerja, pemerintah membuat peraturan yang bertujuan menguntungkan satu sama lain yang disebut sebagai upah minimum. Upah minimum, yaitu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha atau kerjanya. Dalam penetapan upah minimum masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di tiap-tiap perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, yang masing-masing wilayah atau daerah yang tidak sama. Oleh karena itu, upah minimum ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota (Bambang, 2013).

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah provinsi, Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dengan adanya sistem penetapan upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota, berarti masih belum ada keseragaman upah karena masih didasarkan atas pertimbangan dan kelangsungan hidup perusahaan dan pekerja yang bersangkutan. Apabila

mengingat strategi kebutuhan pokok terhadap pekerja yang berada pada sektor informal di daerah perkotaan yang pada umumnya masih mempunyai penghasilan di bawah tarif hidup tertentu (Bambang, 2013).

Kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan. Dari tahun ke tahun upah minimum di berbagai wilayah di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nilai upah minimum yang meningkat setiap tahunnya.

Gambar 1. 1 Perkembangan Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019 (rupiah)



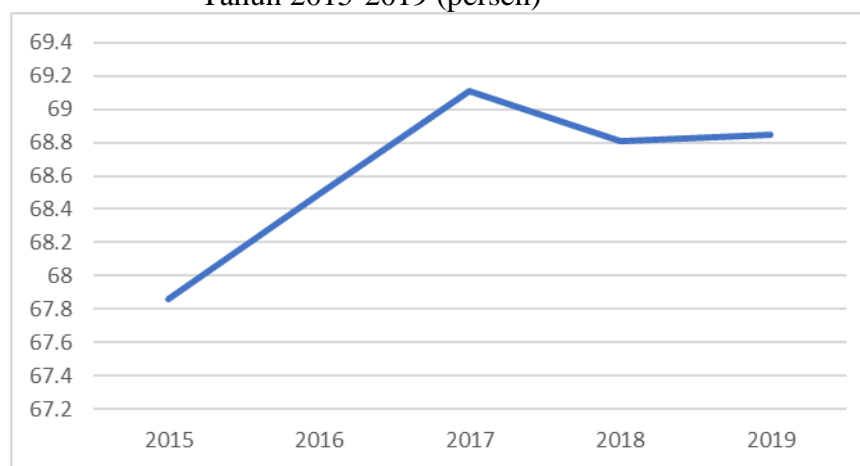
Sumber: *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa Upah Minimum di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Upah minimum di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar Rp 1.265.000 dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi Rp

1.367.000 kemudian pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1.486.065 dan mengalami peningkatan lagi menjadi Rp 1.605.396 pada tahun 2019. Kemudian dari tahun 2019 ke 2020 upah minimum kembali naik, dari Rp 1.605.396 menjadi sebesar Rp 1.742.015.

Salah satu faktor yang menentukan upah minimum adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Badan Pusat Statistik (2020) mendefinisikan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja berarti kenaikan penawaran tenaga kerja. Agar tidak meningkatkan jumlah pengangguran, kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja akan direspon pemerintah dengan menurunkan upah minimum yang ditetapkan. Dengan demikian, beban produksi perusahaan akan berkurang dan pengangguran juga berkurang (Erfit, 2018)

Gambar 1. 2. Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: *Badan Pusat Statistik Jawa Tengah*

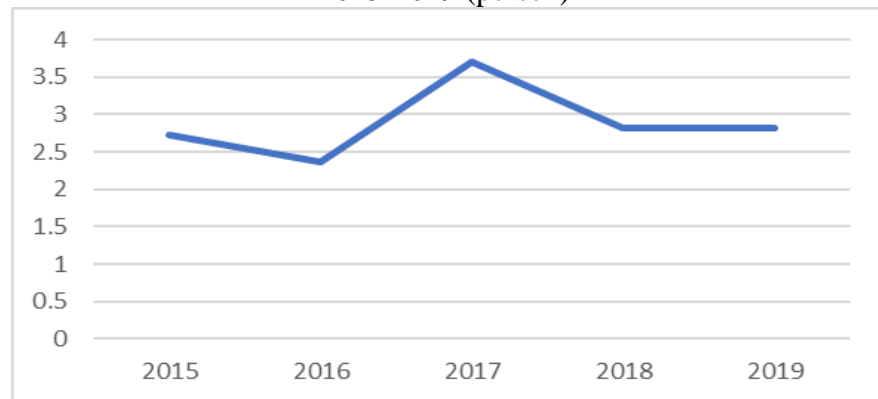
Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dan penurunan selama kurun waktu 2015-2019. Tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 69.11% dan terendah terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 67.86%. Naiknya tingkat partisipasi angkatan kerja menandakan bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Apabila kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah lapangan usaha, maka jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi upah minimum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tingginya nilai PDRB di suatu wilayah menandakan tingginya aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. dalam masyarakat bertambah. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan dalam PDRB, tanpa memandang bahwa kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Selain tingkat partisipasi angkatan kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) faktor lain yang mempengaruhi upah minimum adalah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini akan

berakibat pada meningkatnya kebutuhan hidup layak dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (Charysa, 2013).

Gambar 1. 3 Perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa inflasi di provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3.71% dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 2.36%. Tingginya inflasi mengindikasikan bahwa harga kebutuhan hidup layak masyarakat di Jawa Tengah mengalami peningkatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi penetapan Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019?
2. Apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019?
3. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.
2. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.
3. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan terutama kebijakan yang berkaitan dengan masalah upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menambah literatur ilmiah mengenai hal apa saja yang berpengaruh dalam upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 digunakan alat analisis persamaan regresi data panel. Model persamaan regresi merupakan modifikasi dari penelitian (Erfit, 2018) dan (Merdekawaty, 2016).

$$UMK_t = \beta_0 + \beta_1 TPAK_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 INF_{it} + e_{it}$$

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (juta rupiah)

INF = Inflasi (persen)

E.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari data deret lintang (*cross-section*) sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan kurun waktu (*time-series*) dari tahun 2014 hingga 2019. Sumber data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini terdapat 5 bab, yaitu

1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yang menyebabkan seorang penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian serta beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan, tinjauan penelitian-penelitian terdahulu, dan hipotesis.

3. Bab III Metode Penelitian

Berisi tentang alat analisis apa yang akan digunakan dalam penelitian, metode apa yang dipakai serta pengujian yang tepat untuk

penelitian tersebut, jenis dan sumber data, dan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode dan alat analisis yang telah dibahas pada Bab III. Pembahasan dan hasil analisis yang meliputi seberapa besar pengaruh TPAK, PDRB, inflasi terhadap upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

5. Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dari penelitian tersebut serta saran.